



**PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH  
(TUJUAN SDGS KE-16) SEBAGAI TUJUAN PERTAHANAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA MENGHADAPI  
BONUS DEMOGRAFI TAHUN 2030**

**Susan Cintia Damanik, Herlina Tarigan, Ari Pitoyo, Hikmat Zakky Almubarog**

Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yakni perdamaian, keadilan dan lembaga yang tangguh terhadap pertahanan nasional untuk menghadapi bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2030. Variabel perdamaian diproyeksikan oleh jumlah kejahatan yang ada di Indonesia, variable keadilan diproyeksikan oleh indeks demokrasi, Lembaga yang tangguh diproyeksikan dengan tingkat Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik dan variable dependen Pertahanan Nasional diproyeksikan oleh persentase anggaran sektor pertahanan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dengan jangka waktu data 2015-2020. Penelitian menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara perdamaian dan keadilan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertahanan nasional sedangkan lembaga yang tangguh tidak berpengaruh pada pertahanan nasional.

**Kata Kunci:** Pertahanan Nasional Indonesia, Perdamaian, Keadilan, Lembaga yang Tangguh, Bonus Demografi.

**PENDAHULUAN**

Bonus demografi adalah fenomena ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-

produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dalam suatu negara. Selama kurun waktu satu dekade terakhir ini, Indonesia tengah mengalami fenomena transisi demografi (Maryati, 2015).

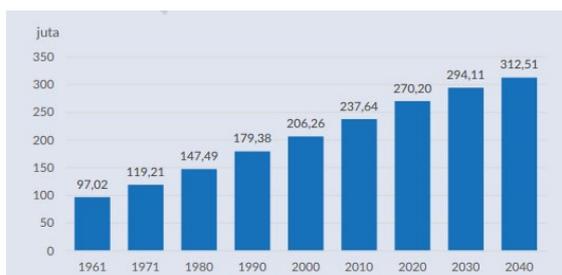
\*Correspondence Address : [susan.tiara.damanik@gmail.com](mailto:susan.tiara.damanik@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i7.2023.3527-3532

© 2023UM-Tapsel Press

Menurut BPS (2022) sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030, di mana jumlah penduduk usia produktifnya akan mencapai puncaknya.

Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta orang. Jumlah ini hampir tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan hasil sensus tahun 1961. Selama periode dari tahun 1961 hingga 2020, pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi pada tahun 1971 hingga 1980 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,4 persen per tahun. Pada periode tahun 1980 hingga 1990, pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 2 persen dan secara bertahap terus menurun menjadi di bawah 2 persen pada periode setelahnya. Pada periode 2010 hingga 2020, pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 1,25 persen. Jika pola pertumbuhan penduduk terus mengikuti perkembangan tahun-tahun sebelumnya, diprediksi bahwa jumlah penduduk pada tahun 2030 akan mencapai 294,11 juta jiwa (bertambah sekitar 23,91 juta dibandingkan dengan tahun 2020), dan pada tahun 2040 diperkirakan mencapai 312,51 juta jiwa (bertambah sekitar 18,40 juta dibandingkan tahun 2030). Pertambahan jumlah penduduk ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun 2010 hingga 2020 yang mencapai 32,56 juta jiwa (gambar 1).



**Gambar 1. Jumlah Penduduk Indonesia (juta jiwa) 1961-2040**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Bonus demografi merupakan peluang yang besar bagi pembangunan nasional Indonesia jika dihadapi dengan menggunakan strategi yang tepat, namun juga dapat menimbulkan tantangan yang kompleks jika tidak dikelola dengan baik. Bonus demografi juga bisa berubah menjadi gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban anggaran negara (Jati, 2015). Oleh karena itu, perencanaan pertahanan nasional menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Bonus demografi dapat menjadi berkah atau bencana bagi suatu negara, tergantung pada bagaimana negara tersebut mengelola potensinya. Ketika penduduk usia produktif meningkat, kesempatan untuk menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih besar, dan negara memiliki kesempatan untuk mengalokasikan sumber daya manusia yang berkualitas untuk berbagai sektor. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi juga dapat menyebabkan masalah seperti tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, dan ketimpangan sosial-ekonomi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) global dimulai pada tahun 2016 dan menyediakan kerangka kerja berbasis bukti untuk perencanaan dan pemrograman pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 (Allen et al., 2018). Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, 2020). SDGs memiliki 17 tujuan dimana salah satu

tujuannya bertajuk Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh yakni tujuan ke-16. Tujuan ke-16 SDGs ("Mencapai Keamanan Hidup yang Aman, Memperkuat Penguasaan Hukum, dan Memastikan Akses yang Adil dan inklusif untuk Semua") menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat sebagai landasan bagi masyarakat yang aman, stabil, dan berkeadilan (gambar 2).



Gambar 2. Sustainable Development Goal

Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/>

Ketiga elemen ini mengakui dan menegaskan bahwa “aturan hukum dan pembangunan memiliki arti penting keterkaitan dan saling memperkuat, sehingga penting untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional” (Tan, 2019). Tujuan ini menjadi sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi bonus demografi tahun 2030, karena mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat akan berdampak positif pada pertahanan nasional.

Menghadapi bonus demografi tahun 2030, Indonesia perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ketimpangan sosial-ekonomi harus diatasi untuk mencegah ketegangan sosial dan potensi

konflik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memfokuskan upaya pada mencapai Tujuan SDGs ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

Relevansi Tujuan SDGs ke-16 dengan Pertahanan Nasional ditunjukkan oleh perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat merupakan prasyarat bagi stabilitas dan keamanan dalam negeri. Bappenas, (2020) mengemukakan Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Dengan mewujudkan tujuan ke-16 SDGs, perkembangan lingkungan strategis yang dinamis yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara dapat ditekan. Dinamika ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata (KEMHAN, 2015).

Membangun organisasi yang kredibel dan nihil masalah merupakan suatu hal yang tidak mudah (Febriyanti & Devi, 2022). Pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang dalam pelaksanaannya mengandung prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan termasuk kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan (Putra, 2019). Keadilan dan kesetaraan akses terhadap pelayanan publik juga penting dalam menciptakan rasa kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap sebuah organisasi/lembaga khususnya pemerintah.

Hal ini akan memperkuat legitimasi pemerintah dan mengurangi

potensi ketegangan politik yang dapat mengancam stabilitas nasional. Sementara itu, kelembagaan yang kuat menjadi dasar bagi implementasi kebijakan dan strategi pertahanan nasional. Dengan lembaga yang kuat dan efektif, pemerintah dapat merespons tantangan keamanan dengan cepat dan tepat. Penelitian ini akan menganalisis apakah perdamaian, keadilan dan lembaga yang tangguh berpengaruh terhadap pertahanan nasional Indonesia untuk menghadapi bonus demografi.

**METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan lembaga penyedia data lainnya dalam jangka waktu tahun 2015 hingga 2020.

Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan program IBM SPSS 25. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen(Ghozali, 2018).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis regresi linier berganda yang dilakukan pada penelitian ini yaitu untuk menguji beberapa variable independen yakni perdamaian, kadilan, dan lembaga yang tangguh terhadap variabel dependen yakni pertahanan nasional. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda yang telah dilakukan didapat hasil yang tertera pada tabel 1 dibawah.

**Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,115	0,013		-9,095	0,012
	Perdamaian(X1)	0,003	0,000	1,796	15,616	0,004
	Keadilan(X2)	0,001	0,000	1,435	14,825	0,005
	Lembaga yang tangguh(X3)	-4,426E-05	0,000	-0,089	-1,443	0,286

a. Dependent Variable: Pertahanan Nasional(Y)

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS, 2023

Sesuai dengan tabel diatas, maka diambil persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0,115 + 0,003X1 + 0,001X2 - 0,00004426X3 + \epsilon$$

Hasil pengujian yang dilakukan pada variabel Perdamaian menunjukkan hasil positif sebesar 0,003 dengan signifikansi 0,004<0,05 terhadap Pertahanan Nasional, sehingga Perdamaian berpengaruh terhadap Pertahanan Nasional. Variabel Keadilan berpengaruh terhadap Pertahanan nasional yang ditunjukkan oleh hasil pengujian sebesar 0,001 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005<0,05. Hasil penelitian juga menunjukkan jika tidak terdapat pengaruh Lembaga yang Tangguh terhadap Pertahanan Nasional yang ditunjukkan oleh hasil pengujian sebesar -0,00004426 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,286>0,05.

**Perdamaian terhadap Pertahanan Nasional**

Perdamaian sebagai Tujuan Ke-16 dari Sustainable Development Goals (SDGs) berpengaruh signifikan terhadap Pertahanan Nasional Indonesia. Tujuan Ke-16 SDGs bertujuan untuk "Mendorong terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan akses yang adil bagi keadilan bagi semua." Perdamaian merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan ini, karena ketika

konflik atau kekerasan terjadi, sumber daya negara teralihkan untuk menangani krisis tersebut, menghambat upaya dalam pembangunan berkelanjutan dan investasi pada Pertahanan Nasional.

Kondisi perdamaian memungkinkan negara untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk sektor pertahanan, memperkuat kemampuan militer dan infrastruktur pertahanan. Selain itu, perdamaian juga mempengaruhi diplomasi, keamanan perbatasan, dan fokus pada pembangunan, yang secara keseluruhan akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi negara dan masyarakatnya. Dengan mencapai perdamaian yang berkelanjutan, negara dapat mengoptimalkan upaya dalam Pertahanan Nasional dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan keamanan dan kemakmuran secara keseluruhan.

### **Keadilan terhadap Pertahanan Nasional**

Tujuan keadilan (SDGs ke-16) memiliki dampak yang signifikan terhadap Pertahanan Nasional suatu negara. Pertama-tama, mencapai keadilan sosial dalam SDGs, yang berfokus pada mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan sosial, membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis. Dengan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, pemerintah dapat mengurangi potensi ketegangan dan konflik internal. Selain itu, tujuan ini juga menekankan pentingnya memperkuat institusi dan pemerintahan yang transparan serta bebas dari korupsi. Dengan adanya tata pemerintahan yang baik dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, dan hal ini dapat berdampak positif pada partisipasi dan dukungan dari masyarakat terhadap Pertahanan Nasional negara.

Tujuan keadilan dalam SDGs juga berdampak langsung pada upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman eksternal. Ketika suatu negara telah mencapai keadilan sosial dan memiliki pemerintahan yang kuat, negaranya menjadi lebih terjamin dari potensi gangguan atau upaya pengaruh negatif dari kelompok ekstremis dan negara-negara lain. Dengan memprioritaskan keadilan dan menciptakan kondisi sosial yang adil, negara dapat memperkuat kapasitas Pertahanan Nasionalnya untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian, mencapai tujuan keadilan dalam SDGs bukan hanya relevan untuk kesejahteraan sosial, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan dan efektivitas Pertahanan Nasional suatu negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanannya.

### **Lembaga yang Tangguh terhadap Pertahanan Nasional**

Lembaga yang tangguh menjadi salah satu indikator dalam mengukur tujuan ke-16 SDGs. Lembaga yang tangguh merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan ini karena berperan dalam membangun sistem hukum yang kuat, tata pemerintahan yang efektif, dan penegakan hukum yang adil. Namun, lembaga yang tangguh tidak berpengaruh terhadap pertahanan nasional. Pertahanan nasional berfokus pada upaya melindungi keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman eksternal atau internal, seperti invasi militer, konflik bersenjata, terorisme, dan lain sebagainya.

Ketika mencapai Tujuan Ke-16 SDGs dengan membangun lembaga yang tangguh, ini akan membantu menciptakan fondasi yang lebih stabil dan aman bagi negara, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kapasitas pertahanan nasional secara keseluruhan. Namun, perlu diingat

bahwa lembaga yang tangguh tidak menjadi faktor langsung yang menentukan dalam konteks pertahanan nasional.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perdamaian dan keadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertahanan Nasional Indonesia. Mencapai tujuan perdamaian dan keadilan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) akan membantu menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan harmonis, serta mengurangi potensi ketegangan dan konflik internal. Dengan kondisi perdamaian dan keadilan yang terwujud, negara dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk sektor pertahanan, memperkuat kemampuan militer dan infrastruktur pertahanan, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman eksternal.

Namun, lembaga yang tangguh, meskipun penting dalam mencapai tujuan ke-16 SDGs, tidak memiliki pengaruh langsung terhadap Pertahanan Nasional. Tetapi, membangun lembaga yang tangguh akan menciptakan fondasi yang lebih stabil dan aman bagi negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, mencapai tujuan perdamaian, keadilan, dan membangun lembaga yang tangguh adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas Pertahanan Nasional dan mencapai tujuan keamanan serta kemakmuran bagi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries. *Concepts, Methodology, and Knowledge Management for Sustainability Science*.

Bappenas. (2020). *Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh*.

BPS. (2022). *Analisis Profil Penduduk Indonesia*.

Febriyanti, P., & Devi, S. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS, KUALITAS PELAYANAN, DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN DONATUR PADA LEMBAGA BALI CHILDREN FOUNDATION (BCF). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 13, Issue 2).

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Jati, W. R. (2015). *BONUS DEMOGRAFI SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN EKONOMI: JENDELA PELUANG ATAU JENDELA BENCANA DI INDONESIA ?* (Vol. 26, Issue 1).

KEMHAN. (2015). *BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA*.

Maryati, S. (2015). *DINAMIKA PENGANGGURAN TERDIDIK: TANTANGAN MENUJU BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA*.

Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*.

Tan, S. (2019). Achieving Goal 16 of the Sustainable Development Goals and Environmental Lessons for Malaysia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 7(2), 233-269. <https://doi.org/10.1017/trn.2019.9>